

NATO Dorong Demokrasi di Armenia di Tengah Isu Kudeta

BRUSSELS (IM) - NATO mendorong demokrasi di Armenia di tengah meningkatnya ketegangan antara militer dan perdana menteri (PM).

"Kami terus memantau perkembangan di negara mitra kami, Armenia. Penting untuk menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut," papar juru bicara NATO Oana Lungescu di Twitter.

"Setiap perbedaan politik harus diselesaikan secara damai dan demokratis serta sejalan konstitusi Armenia," papar dia.

Pernyataan tersebut telah muncul desakan militer Armenia agar Perdana Menteri (PM) Nikol Pashinyan mengundurkan diri.

Kejala Staf Umum Angkatan Darat Onik Gasparyan, bersama dengan komandan senior lainnya, menulis pernyataan pada Kamis (25/2) yang meminta Pashinyan mundur.

Pashinyan menanggapi dengan menyebut tuntutan

itu sebagai upaya kudeta dan mendesak para pendukungnya turun ke jalan untuk melawan.

Kerusuhan itu setelah berakhirnya konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan musim gugur lalu yang secara luas dipandang sebagai kemenangan Baku.

Hubungan antara bekas republik Soviet telah tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas.

Wilayah itu diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.

Selama konflik enam pekan, yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia, Azerbaijan membebaskan beberapa kota strategis dan hampir 300 pemukiman dan desa dari pendudukan Armenia.

Sebelumnya, sekitar 20% wilayah Azerbaijan telah diduduki secara ilegal oleh Armenia selama hampir tiga dekade. **gul**

90 Pengungsi Rohingya Hanyut di Tengah Laut Andaman Beberapa Pekan

DHAKA (IM) - Bangladesh meminta negara-negara di sekitar Laut Andaman menyelamatkan pengungsi Rohingya yang terapung selama beberapa pekan.

"Negara-negara lain, terutama yang, di perairan teritorialnya ditemukan kapal, memikul tanggung jawab utama dan mereka harus memenuhi kewajiban mereka sesuai hukum internasional dan prinsip pembagian beban," ungkap pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bangladesh.

Sembilan puluh pengungsi Rohingya, termasuk 65 wanita, meninggalkan Bangladesh dengan perahu pada 11 Februari 2021.

Mereka berharap bermigrasi ke Malaysia atau negara ketiga lainnya yang sesuai melalui rute laut yang berisiko. Mereka memimpikan kehidupan yang lebih baik.

"Tetapi para pengungsi Rohingya itu terapung-apung setelah mesinnya mati saat melintasi Laut Andaman," papar pernyataan yang dikeluarkan pengawas asal internasional Fortify Rights pada Selasa.

Mengutip anggota kelu-

arga dari beberapa Rohingya yang terdampar sebagai sumber, pernyataan itu menambahkan sejauh ini lebih dari lima pengungsi telah kehilangan nyawa mereka di atas perahu itu, sementara kondisi sebagian besar pengungsi lainnya kritis karena kelaparan dan dehidrasi.

Badan Pengungsi PBB dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu mendesak negara-negara di sekitar Laut Andaman untuk menyelamatkan para pengungsi Rohingya yang terdampar.

Laut Andaman terletak di tenggara Teluk Bengal, selatan Myanmar, barat Thailand, dan timur Andaman India, serta Kepulauan Nicobar.

"Kami telah memberi tahu otoritas maritim negara-negara terkait tentang laporan ini dan meminta bantuan cepat mereka, jika perahu itu ditemukan di wilayah tanggung jawab mereka untuk pencarian dan penyelamatan. Tindakan segera diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah tragedi lebih lanjut," ungkap Indrika Ratwaha, direktur Biro Regional UNHCR untuk Asia dan Pasifik. **tom**



UNJUK RASA PENDUKUNG MILITER MYANMAR

Pendukung militer Myanmar membawa spanduk dan bendera saat reli di Yangon, Myanmar, Kamis (25/2).

PNS Myanmar Mogok Massal, Militer Myanmar Terguncang

Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin menambah pasukan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

YAGON (IM) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Myanmar menolak untuk bekerja dengan militer Myanmar dan melakukan mogok kerja. Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin menambah pasukan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika kita pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen yang meminta untuk menggunakan nama samaran.

Seperti dilansir AFP, Jumat (26/2) sejak kudeta, Thida menolak untuk mengajar kelas online-nya. Dia bergabung dengan petugas medis yang juga melakukan mogok kerja. Banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh militer.

Peningkatan jumlah PNS yang melakukan mogok massal membuat militer mulai terguncang. Tanpa mereka, militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan

tes Covid-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.

Momok krisis keuangan yang sudah muncul karena pandemi dan penurunan investasi asing - kian mengancam Myanmar. Belum diketahui jumlah pasti para pekerja yang melakukan mogok massal. Sebuah survey Crowdsourced menemukan, anggota dari 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi itu. Menurut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan pemogokan.

"Hampir sepertiga dari rumah sakit negara tidak lagi berfungsi," kata pemimpin militer Min Aung Hlaing minggu ini. Dalam sebuah pernyataan yang dimuat media pemerintah pada Selasa (23/2) Min Aung Hlaing mencela profesional medis yang dianggap gagal melakukan tugas. Dia juga mengisyaratkan akan memberikan hadiah yang tunai kepada dokter dan guru yang tetap bekerja.

Seorang dokter mengatakan kekurangan staf berarti rumah sakitnya harus menolak pasien baru. "Tim pelindung" medis telah dibentuk untuk memberi-

kan perawatan darurat kepada para pengunjung rasa yang diserang tembakan peluru karet dan peluru tajam. Selain itu, seluruh pekerja, sopir dan administrator pemerintah dipecah karena ketidakhadiran mereka.

"Militer tidak mengantisipasi bahwa sebagian besar pamong praja akan keluar dan meninggalkan mereka tanpa aparat negara," kata seorang analis yang tidak ingin disebutkan namanya untuk menghindari penahanan.

"Dampak gerakan tidak selalu bergantung pada semua birokrasi yang berpartisipasi, tetapi pada bagian-bagian penting yang melumpuhkan kemampuan militer untuk mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikan ke seluruh negara," imbuhnya.

Bank Ekonomi Myanmar (MEB), yang mendistribusikan gaji dan pensiun pemerintah, tertatih-tatih akibat mogok massal. Meski begitu, media pemerintah membantah dan mengatakan "rumor itu tak berdasar" dan kompensasi tidak akan dibekukan.

Menguatkan kekhawatiran para jenderal, setiap hari media resmi melakukan pemanggilan kepada para PNS untuk kembali bekerja atau diancam menghadapi tindakan hukum.

"Semua pegawai negeri dari kementerian yang berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil mendapat tekanan," kata staf MEB.

Seorang pemimpin pembertarikan pro-demokrasi 1988,

Min Ko Naing, mendesak pegawai pemerintah melanjutkan pemogokan mereka. Ko Naing menjelaskan di Facebook bahwa hal tersebut adalah faktor penting dalam upaya menjatuhkan rezim.

Lebih lanjut, anggota pemerintah sipil yang digulirkan berjanji memberi kompensasi atas gaji yang hilang jika mereka merebut kembali kekuasaan. Memicu harapan pekerja seperti Thida.

"Saya sama sekali tidak khawatir kehilangan pekerjaan karena saya yakin demokrasi akan dipulihkan," kata Thida.

Sebelumnya, Polisi Myanmar melancarkan tindakan keras di distrik Yangon, Kamis (25/2) malam waktu setempat. Kekerasan polisi terjadi setelah mereka membubarkan protes untuk menentang pejabat lokal yang ditunjuk militer.

Kekerasan Kamis malam pecah (25/2) di jalan-jalan pusat komersial Yangon setelah beberapa dari sekitar 1.000 loyalis militer menyerang pendukung dan media pro-demokrasi. Beberapa orang dipukuli oleh sekelompok pria yang beberapa diketahui bersenjata pisau. Sementara yang lainnya menembakkan ketapel dan melemparkan batu. Video dari saksi mata menunjukkan setidaknya dua orang ditikam.

Saksi mata mengatakan, dalam insiden terpisah, polisi anti-huru hara menembakkan gas air mata ke lingkungan Tamwe

di Yangon untuk membubarkan kerumunan yang memprotes penggantian pejabat lokal oleh militer. Penduduk kemudian mengatakan mereka mendengar tembakan berulang-ulang dan bahwa polisi tetap berada di beberapa bagian distrik sampai sekitar pukul 02.00 pada hari Jumat (26/2).

Sejumlah anak muslim Rohingya membaca alquran di masjid kampung Char Pauk, Sittwe, Myanmar.

"Kami benar-benar ketakutan," kata salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan dikutip laman Channel News Asia, Jumat (26/2).

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang menggunakan kekuatan minimal. Namun demikian, setidaknya tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya setelah militer menuding pemilu November palsu.

Aksi unjuk rasa dan pemogokan harian oleh para pendukung pro-demokrasi telah terjadi selama sekitar tiga pekan. Aksi massa seringkali menarik ratusan ribu orang di seluruh negara yang beragam yang membentang dari negara tersebut. **tom**

Sebanyak 18 Juta Orang Dewasa AS Menjadi Kaum LGBT

WASHINGTON (IM) - Sekitar 5,6 persen atau 18 juta orang dewasa Amerika Serikat (AS) mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBT [lesbian, gay, biseksual, dan transgender]. Ini merupakan data nasional baru dari lembaga survei Gallup.

Berdasarkan data historis yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut, ini merupakan rekor tertinggi sejak 2012. Ini merupakan lompatan besar dari angka tahun 2017, yang menemukan 4,5 persen orang dewasa AS teridentifikasi sebagai bagian dari spektrum LGBT.

Data baru ini berdasarkan lebih dari 15.000 wawancara yang dilakukan antara peneliti Gallup dan warga Amerika berusia 18 tahun atau lebih pada tahun 2020. Survei mencatat bahwa hasil tersebut membahas orang dewasa yang diidentifikasi sebagai LGBT, tetapi tidak mengomentari komunitas LGBTQ+ yang lebih luas.

Khususnya, survei tersebut memungkinkan responden untuk menyesuaikan tanggapan mereka saat mendiskusikan identitas gender mereka alih-alih membiarkan bincar standar "ya" atau "tidak" sebagai satu-satunya pilihan jawaban.

Di antara banyak tren yang diidentifikasi dalam tanggapan ini, para peneliti melihat generasi muda secara signifikan lebih cenderung memiliki identitas seksual selain heteroseksual.

"Pada saat orang Amerika semakin mendukung persamaan hak bagi kaum gay, lesbian dan transgender, semakin banyak orang Amerika yang mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT," tulis laporan Gallup, yang dilansir The Hill, Jumat (26/2).

"Dengan generasi yang lebih muda jauh lebih mungkin dibantu oleh generasi yang lebih tua untuk menganggap diri mereka

LGBT, pertumbuhan itu semestinya terus berlanjut."

Dalam Generasi Z, demografi dewasa termuda yang berusia antara 18 hingga 23 tahun pada tahun 2020, sekitar 1 dari 6 cenderung mengidentifikasi sebagai LGBT. Sekitar 11,5 persen melaporkan mengidentifikasi diri sebagai biseksual. Dua persen lainnya diidentifikasi sebagai gay, lesbian, atau transgender.

Tren lain termasuk responden wanita yang lebih cenderung mengidentifikasi diri sebagai LGBT daripada rekan pria mereka, serta lebih cenderung mengidentifikasi diri sebagai biseksual.

Hasil survei juga berbeda di sepanjang garis partai. Sekitar 8,8 persen dari Partai Demokrat mengidentifikasi sebagai LGBT, dengan 1,7 persen dari Partai Republik termasuk diri mereka sendiri dalam komunitas LGBT.

Menariknya, perbedaan tersebut menjadi lebih terasa saat menanyakan responden tentang ideologi politik mereka. Sekitar 13 persen orang dewasa yang mengidentifikasi diri sebagai penganut politik liberal melaporkan sebagai anggota komunitas LGBT, sementara hanya 2,3 persen konservatif mengatakan hal yang sama.

Selain angka-angka tersebut, 86,7 persen orang dewasa AS mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual atau straight.

Gallup menyimpulkan bahwa perbedaan besar dalam asosiasi LGBT bertepatan dengan usia. Korelasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah "identifikasi LGBT yang lebih tinggi pada orang Amerika yang lebih muda daripada yang lebih tua mencerminkan pergeseran yang sebenarnya dalam orientasi seksual, atau jika itu hanya mencerminkan kesediaan yang lebih besar dari orang yang lebih muda untuk mengidentifikasi sebagai LGBT?" **budi**

Armenia Terancam Kudeta Militer

YEREVAN (IM) - Krisis politik di Armenia berubah menjadi kekacauan setelah ribuan pendukung dan anti-pemerintah Perdana Menteri (PM) Nikol Pashinyan sama-sama turun ke jalan, hari Kamis. Situasi semakin tegang ketika jet-jet tempur berdentung keras di Ibu Kota Armenia, Yerevan.

PM Pashinyan ikut turun ke jalan di ibu kota, memimpin aksi para pendukungnya yang betriak "Perdana Menteri Nikol!". Pashinyan mengatakan negaranya memang terancam oleh percobaan kudeta militer setelah pihak angkatan bersenjata menuntunya mengundurkan diri.

Krisis politik ini terjadi di tengah perpecahan reaksi publik atas penahanan pemerintah terhadap perang tahun lalu dengan Azerbaijan untuk memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Beberapa jam setelah staf umum militer Armenia membuat seruan menggejutkan agar pemerintahnya mundur, Pashinyan mengumpulkan sekitar 20.000 pendukung di pusat ibu kota untuk menentang apa yang dia katakan sebagai upaya untuk menggulingkannya.

Tak mau kalah, kubu oposisi mengumpulkan sekitar 10.000 pendukungnya tidak jauh dari sana kubu pro-pemerintah. Mereka mulai memasang tenda dan membangun barikade di luar parlemen saat mereka berjanji untuk mengadakan demonstrasi sepanjang waktu.

Para pengunjuk rasa kubu oposisi terdengar meneriakkan "Nikol, dasar pengkhianat!" dan "Nikol, mundur!" Publik Armenia juga berbagi video di media sosial tentang jet-jet tempur yang menggilingi Yerevan dan berdentung keras.

Kejala Staf Umum Angkatan Darat Onik Gasparyan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan PM Pashinyan untuk memecat Tiran Khacharyan, wakil kepala staf umum pertama Angkatan Darat.

Gasparyan menuntut pengunduran diri Pashinyan dan mengatakan kabinet PM juga harus mundur. "Perdana menteri dan pemerintah tidak lagi dapat membuat keputusan yang masuk akal," bunyi pernyataan militer tersebut.

"Untuk waktu yang lama, Angkatan Bersenjata Armenia dengan sabar menoleransi 'serangan' oleh pemerintah yang sedang berkuasa yang bertujuan untuk memfithan angkatan bersenjata, tetapi semuanya ada batasnya," lanjut pernyataan itu yang dilansir Armenpress, Jumat (26/2).

Pernyataan itu ditandatangani oleh Gasparyan, para deputinya, dan personel militer tertinggi yang merupakan staf umum angkatan bersenjata Armenia.

Sementara PM Pashinyan menanggapi dengan menantang, "Saya memerintahkan semua jenderal, perwira, dan tentara:

Lakukan tugas Anda melindungi perbatasan negara dan integritas teritorial," katanya dalam pertemuan umum.

"Tentara harus mematuhi rakyat dan otoritas terpilih," lanjut Pashinyan.

Dia berusaha meremehkan pernyataan militer tersebut, dengan mengatakan itu adalah "reaksi emosional" terhadap pemecatan terhadap Khacharyan.

Khacharyan telah mengejek klaim oleh PM Pashinyan bahwa rudal Iskander yang dipasok oleh Rusia sekutu militer utama Armenia telah gagal mencapai target selama perang memperebutkan wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

Tapi oposisi Armenia mendesaknya untuk memperhatikan permintaan tersebut.

"Kami menyerukan kepada Nikol Pashinyan untuk tidak memimpin negara menuju perang saudara dan untuk menghindari pertumpahan darah. Pashinyan memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghindari kekacauan," kata Prosperous Armenia [Armenia Sejahtera], partai oposisi terbesar di negara itu, dalam sebuah pernyataan.

Prosperous Armenia dan partai oposisi lainnya, Bright Armenia, menyerukan diadakannya sesi parlemen yang luar biasa, yang dikendalikan oleh sekutu Pashinyan. **ans**



BEREBUT NAIK KE DALAM BUS

Warga berebut untuk naik ke dalam bus di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Mumbai, India, Kamis (25/2).



MEN'S CROSS COUNTRY SPRINT2

Pemain ski asal Norwegia Haavard Solaas Taugbol memenangkan babak perempat final Men's Cross Country Sprint dalam Kejuaraan Dunia Ski FIS Nordic, mengalahkan Federico Pellegrino asal Italia dan Joni Maki asal Finlandia, di Obertsdorf, Jerman, Kamis (25/2).

Dituduh Tiduri Beberapa Istri Orang, Wapres Ini Akhirnya Angkat Bicara

saya, saya salut atas dukungan

yang saya dapatkan dari sesama warga, kolega, dan kawan yang sepenuhnya memahami kompleksitas kaku dari serangan yang dibuat-buat. Dengan latar belakang inilah saya secara tegas menajuhkan diri dari perilaku tidak bermoral [seperti] yang dibayangkan," paparnya.

"Saya tetap menjadi pemimpin, bapak, kader dan abdi bangsa yang besar ini. Jadi, tidak ada yang akan berubah karena semua ini dibuat-buat untuk menodai citra saya. Jika sesuatu akan terjadi, Yang Mulia akan menentukan masa depan saya," lanjut dia.

Media setempat, ZimLive telah merilis tiga rekaman audio baru-baru ini di mana Mohadi terdengar berbicara dengan berbagai wanita yang diduga selingkuhannya tentang masalah terkait seks. Salah satu perempuan yang sudah menikah, yang diidentifikasi sebagai Abigail Muleya Mumpande, bekerja di kantornya. Media lokal lainnya bahkan menjuluki Mohadi sebagai Wapres gila seks. **ans**

"Saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa saya adalah korban intrik politik yang dijajakan melalui peretasan dan kloning suara. Terlepas dari kepadatan tuduhan yang ditujukan terhadap